

**KOLABORASI PEMERINTAH DAN KOMUNITAS LINGKUNGAN
DALAM GERAKAN LAMPUNG BERSIH**

(TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER)

Oleh:

**ALICIA ZHAFIRA HANUM
2456041039**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2025**

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Teori	7
2.2 Kajian Terdahulu.....	9
2.3 Kerangka Pikir	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Jenis Penelitian.....	15
3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian	16
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.5 Teknik Analisis Data.....	19
3.6 Teknik Keabsahan Data	20
DAFTAR PUSTAKA	23

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan telah menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Bandar Lampung. Sebagai ibu kota provinsi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi, perkembangan Bandar Lampung yang sangat cepat tidak hanya membawa kemajuan finansial, tetapi juga menciptakan berbagai masalah lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah dan kebersihan.

Menurut data dari *BPS Bandar Lampung (2023)*, jumlah penduduk mencapai 1.226.356 jiwa dengan kepadatan rata-rata mencapai 7.800 jiwa/km². Peningkatan jumlah penduduk ini berpengaruh langsung pada bertambahnya volume sampah dan tekanan terhadap infrastruktur lingkungan. *Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung (2024)* mencatat bahwa setiap harinya kota ini menghasilkan lebih dari 900 ton sampah, sementara kapasitas pengangkutan hanya mampu menampung sekitar 75% dari total produksi sampah tersebut.

Hal ini menyebabkan banyak sampah menumpuk di kawasan perumahan, pasar, dan sungai, terutama di daerah padat penduduk seperti Kedaton, Rajabasa, dan Tanjung Karang Pusat. Isu kebersihan tidak hanya mempengaruhi tampilan kota, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah yang menumpuk sering kali menyebabkan bau tidak sedap, menarik penyakit, serta menyumbat saluran drainase yang memperburuk banjir musiman. Di sisi lain, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan masih rendah. Banyak warga beranggapan bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan kewajiban bersama. Sebenarnya, paradigma modern dalam pengelolaan lingkungan menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan kolaborasi antara berbagai aktor sosial (*Emerson & Nabatchi, 2015*).

Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan Gerakan “Lampung Bersih”, sebuah inisiatif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, komunitas lingkungan, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum dengan tujuan

menciptakan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Gerakan ini hadir sebagai respons terhadap semakin rumitnya masalah lingkungan yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Gerakan “Lampung Bersih” berfokus pada konsep kolaborasi antar sektor atau tata kelola kolaboratif, di mana berbagai pihak baik pemerintah, komunitas, maupun masyarakat sipil bekerja sama dalam merumuskan, menjalankan, dan menilai kebijakan kebersihan lingkungan.

Seperti yang dijelaskan oleh *Ansell dan Gash (2008)*, tata kelola kolaboratif adalah proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan pemerintah dan aktor non-pemerintah secara langsung, dengan tujuan menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi kepentingan publik. Di Bandar Lampung, beberapa komunitas lingkungan telah aktif mendukung gerakan ini. Contohnya, Komunitas Lampung *Eco Warrior*, Gerakan Lampung Hijau, dan *Green Generation* Lampung secara rutin melakukan kegiatan bersih sungai, edukasi tentang daur ulang, dan kampanye pengurangan plastik sekali pakai di sekolah serta pasar tradisional. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kebersihan, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi yang memungkinkan masyarakat menjadi subjek, bukan sekadar objek, dalam proses pembangunan lingkungan.

Walau begitu, pelaksanaan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lingkungan tidak selalu berjalan lancar. Dalam praktiknya, seringkali ada kendala seperti kurangnya komunikasi yang baik, tumpang tindih wewenang antarinstansi, minimnya dukungan anggaran, dan lemahnya koordinasi antara berbagai aktor. Di sisi lain, beberapa komunitas lingkungan juga menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan pendanaan untuk menjalankan program kebersihan yang berkelanjutan. Secara teoritis, situasi ini bisa dijelaskan melalui pendekatan teori sistem terbuka (*Katz & Kahn, 1978*), di mana pemerintah daerah berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan membutuhkan masukan dari masyarakat.

Untuk mencapai kolaborasi yang berhasil, diperlukan komunikasi dua arah, keterbukaan informasi, dan saling percaya antar pihak. Jika ketiga elemen ini tidak ada, kolaborasi seringkali hanya menjadi rutinitas administratif yang tidak membawa perubahan berarti. Selain faktor institusi, budaya partisipasi masyarakat juga memiliki peranan krusial. Berdasarkan survei *Kemendagri (2023)* tentang

partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan, hanya sekitar 43% penduduk perkotaan di Indonesia yang pernah ikut serta secara langsung dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan di tingkat RT/RW. Tingkat partisipasi yang rendah ini menunjukkan perlunya pendekatan kolaboratif yang lebih responsif dan berbasis masyarakat agar program kebersihan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Inisiatif “Lampung Bersih” juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*), terutama tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan tujuan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim). Melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat serta memperkuat tata kelola lingkungan yang inklusif dan adil.

Dari perspektif penelitian, kajian mengenai kerja sama antara pemerintah dan masyarakat lingkungan dalam konteks perkotaan masih tergolong sedikit, terutama di daerah Sumatra bagian selatan. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada efektivitas kebijakan pengelolaan sampah (*Rahmawati, 2021*), atau sikap masyarakat terhadap lingkungan (*Putri, 2020*), tanpa melakukan analisis mendalam terhadap dinamika kolaborasi antar aktor.

Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam memahami bagaimana kolaborasi tersebut berlangsung di Bandar Lampung, apa saja faktor yang menjadi penghambat dan pendukung, serta bagaimana kolaborasi mempengaruhi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kota. Dengan menerapkan metode kualitatif, penelitian ini akan menggali pengalaman nyata dari para aktor yang terlibat dari pihak pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, kelurahan) maupun komunitas lingkungan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan “Lampung Bersih”.

Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap makna subjektif, interaksi sosial, serta dinamika kolaboratif yang terjadi di lapangan. Secara ringkas, penelitian ini berasumsi bahwa masalah lingkungan bukan hanya isu teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan lembaga. Oleh karena itu, solusi yang efektif harus melibatkan berbagai pihak dalam sistem kolaborasi yang setara dan saling mendukung. Gerakan “Lampung Bersih” menjadi contoh nyata bagaimana

kolaborasi tersebut dapat diterapkan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, berikut adalah pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lingkungan dalam pelaksanaan gerakan “Lampung Bersih” di Kota Bandar Lampung?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam kolaborasi tersebut?
3. Bagaimana dampak kolaborasi pemerintah dan komunitas terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk dan mekanisme kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lingkungan dalam pelaksanaan gerakan “Lampung Bersih”.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi tersebut.
3. Menganalisis dampak kolaborasi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan kualitas kebersihan lingkungan di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk membantu kajian administrasi publik, khususnya yang berfokus pada bagaimana berbagai kelompok dapat bekerja sama dalam mengelola lingkungan. Penelitian ini dapat membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah yang berdampak pada lingkungan, seperti menjaga kebersihan jalan dan lahan serta mengelola sampah. Penelitian ini menambah pengetahuan yang ada tentang bagaimana bekerja sama dengan berbagai

kelompok masyarakat dan organisasi dapat membuat kebijakan publik yang melibatkan masyarakat menjadi lebih berhasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana cara masyarakat menjaga lingkungan mempengaruhi seberapa besar keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan untuk kota mereka. Hal ini relevan dengan upaya akademis untuk mengembangkan konsep tata kelola yang tidak hanya bersifat hierarkis dan birokratis, namun juga kolaboratif dan partisipatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu pemerintah kota Bandar Lampung khususnya yang peduli lingkungan untuk membuat perencanaan dan aturan yang lebih baik untuk bekerja sama dengan masyarakat yang peduli lingkungan. Penelitian ini dapat membantu kita menciptakan cara-cara yang lebih baik dalam berbicara dan bekerja sama untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Hal ini juga dapat membantu kita memutuskan siapa melakukan apa dan bagaimana melakukannya dengan baik. Hal ini akan membuat gerakan “Lampung Bersih” menjadi lebih efektif dan bertahan lama.

Penelitian ini dapat membantu orang-orang yang peduli terhadap lingkungan dan kelompok yang berupaya menjaga kebersihan kota. Penelitian ini dapat membantu kita memikirkan dan memeriksa seberapa baik kita telah bekerja sama sejauh ini, dan juga memberi kita beberapa ide untuk membuat cara bekerja sama yang lebih baik dan lebih fleksibel di masa depan.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana kerja sama dapat membantu menjaga lingkungan tetap bersih dan berkelanjutan. Melalui pemahaman hasil penelitian ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat.

Penelitian ini juga dapat mendorong tempat lain untuk menciptakan gerakan serupa yang bekerja sama dengan pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Penelitian ini penting untuk mempelajari hal-hal baru, tetapi juga membantu masyarakat perkotaan untuk hidup lebih baik. Hal ini dilakukan dengan menjadikan kota lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian yang saling berhubungan dan mengikuti satu sama lain, sehingga pembahasan dapat tersusun secara jelas dan masuk akal. Penelitian ini menjelaskan bagaimana mengklasifikasikan dan memberi nama berbagai jenis tulisan.

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini penting, rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik, tujuan penelitian yang menguraikan hasil yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini diakhiri dengan sistem penulisan yang membantu mengatur penelitian.

Bab II membahas beberapa ide yang penting untuk penelitian, seperti bagaimana masyarakat dapat bekerja sama untuk mengambil keputusan, bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam komunitasnya, dan bagaimana berbagai orang dapat bekerja sama untuk membuat kebijakan publik. Bab ini juga menggunakan hasil penelitian sebelumnya untuk membandingkan dan mendukung argumentasi ilmiah. Disusun pula kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana keterkaitan variabel-variabel penelitian, baik secara logika maupun konteks penelitian.

Bab III berbicara tentang bagaimana penulis melakukan penelitian. Ini juga memberi tahu jenis penelitian apa yang dilakukan. Penelitian tersebut menggunakan cara mempelajari sesuatu yang tidak bersifat numerik atau statistik, melainkan berdasarkan kata-kata dan deskripsi. Bab ini juga memberitahu di mana dan apa yang dilakukan penelitian, bagaimana mendapatkan informasi yang kami butuhkan, dan bagaimana menggunakannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Menggunakan metode berbeda untuk mengumpulkan informasi, seperti berbicara dengan orang, mengamati mereka, dan menuliskan apa yang mereka katakan dan lakukan. Menggunakan berbagai cara untuk menampilkan dan memahami informasi, seperti mempersingkatnya, membuatnya lebih mudah dibaca, dan mencari tahu artinya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Kajian teori merupakan fondasi konseptual yang menjadi dasar untuk memahami fenomena kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lingkungan dalam pelaksanaan *Gerakan Lampung Bersih*. Dalam penelitian kualitatif, teori digunakan sebagai alat analisis untuk menafsirkan dinamika sosial, makna, dan hubungan antaraktor yang terlibat dalam suatu proses sosial tertentu (Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas lingkungan terbentuk, dijalankan, serta memberikan dampak terhadap pengelolaan kebersihan di Kota Bandar Lampung.

Fenomena *Gerakan Lampung Bersih* mencerminkan pergeseran paradigma dari konsep *government* ke *governance*, di mana pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku utama dalam penyelenggaraan kebijakan publik, melainkan bekerja bersama aktor-aktor non-pemerintah untuk mencapai tujuan bersama (Rhodes, 1996). Kolaborasi tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan nilai-nilai partisipasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dwiyanto, 2018).

Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* adalah proses tata kelola di mana lembaga pemerintah secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang bersifat konsensus dan deliberatif. Kolaborasi menuntut adanya komunikasi yang terbuka, kesetaraan peran, serta komitmen jangka panjang antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks *Gerakan Lampung Bersih*, kolaborasi tersebut terlihat dari kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dengan komunitas seperti Bank Sampah Induk Lampung, Komunitas Zero Waste, dan organisasi masyarakat lainnya yang peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Kolaborasi pemerintahan menurut Ansell dan Gash (2008) juga memiliki enam prasyarat utama, yaitu: kondisi awal yang memadai, desain kelembagaan yang inklusif, kepemimpinan fasilitatif, partisipasi setara, komunikasi langsung, serta hasil berupa kepercayaan dan komitmen bersama. Dalam konteks Lampung Bersih,

semua aspek tersebut dapat diamati dalam bentuk kegiatan koordinasi, pertemuan lintas pihak, serta kerja lapangan yang melibatkan warga secara langsung.

Selain itu, teori *governance kolaboratif* yang dikembangkan *Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)* menegaskan pentingnya tiga unsur utama, yaitu *engagement yang berprinsip* (komitmen bersama atas nilai dan tujuan), *motivasi bersama* (kepercayaan dan rasa memiliki terhadap hasil), serta *kapasitas tindakan kolektif* (kemampuan bertindak bersama untuk mencapai tujuan). Dalam gerakan Lampung Bersih, ketiga komponen ini tampak pada pembagian peran antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Pemerintah menyediakan regulasi, fasilitas, dan sumber daya, sementara komunitas memberikan dukungan sosial, jaringan, serta pengorganisasian lapangan.

Teori partisipasi masyarakat dari *Cohen dan Uphoff (1980)* juga relevan dalam konteks ini. Menurut mereka, partisipasi masyarakat merupakan proses keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Masyarakat yang berpartisipasi secara aktif tidak hanya menjadi penerima manfaat, melainkan juga menjadi aktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan program. Dalam gerakan Lampung Bersih, partisipasi ini terlihat melalui kegiatan gotong royong, edukasi lingkungan, dan sistem pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas.

Kemudian, teori pemberdayaan masyarakat dari *Soetomo (2019)* menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat diberdayakan, yaitu memiliki kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Melalui pemberdayaan, masyarakat tidak lagi bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi mampu mandiri mengelola kebersihan lingkungannya. Program seperti pelatihan daur ulang, pelibatan kader lingkungan, dan bank sampah merupakan wujud nyata dari penerapan teori ini di lapangan.

Putnam (1993) dengan teori *modal sosial* menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama dalam masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan (trust), norma sosial, dan jaringan sosial (*social network*). Dalam konteks Lampung Bersih, modal sosial menjadi perekat hubungan antara komunitas dan pemerintah. Kepercayaan dibangun melalui komunikasi intensif dan hasil nyata di lapangan,

sementara norma sosial terwujud dalam bentuk kesadaran kolektif menjaga kebersihan.

Selanjutnya, teori jaringan kebijakan (*policy network theory*) yang dikemukakan *Agranoff dan McGuire (2001)* menjelaskan bahwa kebijakan publik kini dijalankan melalui jaringan antaraktor lintas sektor. Pemerintah tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan komunitas, LSM, akademisi, dan sektor swasta. Jaringan inilah yang memperkuat kolaborasi dalam *Gerakan Lampung Bersih*. Setiap aktor memiliki sumber daya, peran, dan kepentingan yang berbeda, tetapi disatukan oleh tujuan bersama menciptakan kota yang bersih dan berkelanjutan.

Dengan demikian, teori kolaborasi, partisipasi masyarakat, governance kolaboratif, pemberdayaan, modal sosial, dan jaringan kebijakan menjadi fondasi untuk memahami kolaborasi pemerintah dan komunitas lingkungan di Bandar Lampung. Keenam teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana interaksi, kepercayaan, komunikasi, serta tanggung jawab bersama menjadi faktor kunci keberhasilan gerakan kebersihan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam memberikan dasar konseptual dan empiris bagi penelitian ini. Dengan meninjau hasil-hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat memahami pola, kesenjangan, dan perkembangan teori maupun praktik kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lingkungan, khususnya dalam konteks gerakan kebersihan dan pelestarian lingkungan di daerah perkotaan seperti Bandar Lampung.

Penelitian oleh *Sari dan Nurdin (2021)* berjudul “*Kolaborasi Pemerintah dan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Bandung*” menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan teknis pemerintah daerah, tetapi juga oleh sejauh mana partisipasi komunitas dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa inisiatif masyarakat seperti *Bank Sampah Bersinar* dan *Komunitas Eco Bandung* mampu memperkuat efektivitas kebijakan

pemerintah. Peneliti menemukan bahwa kolaborasi yang baik membutuhkan transparansi, komunikasi yang terbuka, serta peran aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan. Hasil studi ini memberikan dasar empiris bahwa kolaborasi yang dibangun melalui pendekatan partisipatif akan menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program lingkungan.

Selanjutnya, penelitian oleh *Putra dan Sulastri (2020)* mengenai “*Model Kolaborasi Multiaktor dalam Pengelolaan Lingkungan di Kota Surabaya*” memperlihatkan bahwa kota yang berhasil dalam pengelolaan sampah biasanya memiliki sistem koordinasi lintas sektor yang kuat. Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini, memposisikan komunitas sebagai mitra sejajar yang memiliki otonomi dalam mengembangkan inovasi pengelolaan sampah. Peneliti menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh dua faktor kunci, yaitu kepemimpinan yang inklusif dan mekanisme komunikasi antaraktor. Hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi Kota Bandar Lampung dalam mengembangkan model kolaborasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas.

Penelitian yang dilakukan oleh *Utami (2022)* berjudul “*Kolaborasi Pemerintah dan Komunitas dalam Implementasi Program Adiwiyata di Yogyakarta*” menyoroti pentingnya kesamaan visi dan misi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi dapat berjalan efektif apabila setiap pihak memiliki tanggung jawab dan komitmen yang jelas. Dalam konteks program Adiwiyata, pemerintah berperan sebagai fasilitator, sedangkan komunitas dan sekolah berperan sebagai pelaksana kegiatan yang menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan sejak dini. Penelitian ini relevan untuk gerakan *Lampung Bersih* karena sama-sama menitikberatkan pada kolaborasi lintas sektor yang berbasis pada perubahan perilaku masyarakat.

Kemudian, penelitian oleh *Rahmadani (2023)* yang berjudul “*Peran Komunitas Lingkungan dalam Mendorong Gerakan Kota Hijau di Medan*” menemukan bahwa komunitas lingkungan memainkan peran penting sebagai penggerak partisipasi publik. Melalui kegiatan kampanye, edukasi, dan advokasi, komunitas berhasil membangun kesadaran masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan

kebijakan dari pemerintah daerah agar komunitas dapat berperan lebih luas. Hasil ini memberikan pelajaran bahwa tanpa kebijakan yang inklusif dan dukungan sumber daya, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas hanya akan bersifat seremonial.

Selain itu, *Arifin dan Mulyana (2019)* dalam penelitiannya “*Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Semarang*” menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan pilar utama keberhasilan tata kelola lingkungan. Pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat cenderung lebih berhasil dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan juga proses sosial yang melibatkan nilai, kepercayaan, dan tujuan bersama.

Penelitian lain yang relevan adalah studi *Prasetyo dan Dewi (2020)* berjudul “*Strategi Kolaborasi Pemerintah dan Komunitas dalam Program Gerakan Jakarta Bersih*”. Peneliti mengidentifikasi bahwa faktor koordinasi, motivasi, dan dukungan sumber daya menjadi tantangan terbesar dalam implementasi kolaborasi. Tanpa dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai, komunitas akan kesulitan mempertahankan keberlanjutan program. Namun, ketika komunitas diberikan ruang partisipasi yang luas, hasilnya lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku warga kota.

Dalam konteks Lampung, *Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung (2023)* mencatat bahwa volume sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai sekitar 850 ton, sementara kapasitas pengangkutan hanya sekitar 60% menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung. Data ini menunjukkan perlunya keterlibatan aktif komunitas lokal agar beban pengelolaan sampah tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Berbagai komunitas seperti *Zero Waste Lampung*, *Bank Sampah Induk Lampung*, dan *Greeners Lampung* telah berkolaborasi dengan DLH melalui kegiatan edukasi, daur ulang, serta pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini menjadi contoh konkret penerapan kolaborasi lingkungan berbasis masyarakat di tingkat lokal.

Dari seluruh penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pola kolaborasi yang efektif memiliki beberapa kesamaan, antara lain: adanya komunikasi dua arah yang

transparan, dukungan kebijakan yang memadai, pembagian peran yang jelas antaraktor, serta adanya *trust building* antara pemerintah dan komunitas. Namun, kesenjangan penelitian masih terlihat pada aspek *institutional learning* atau pembelajaran kelembagaan yakni bagaimana pemerintah dan komunitas membangun kapasitas bersama secara berkelanjutan. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah dinamika kolaborasi pemerintah dan komunitas lingkungan di Bandar Lampung, baik dari aspek struktural maupun kultural.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan landasan konseptual yang menghubungkan teori-teori utama dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian mengenai *Kolaborasi Pemerintah dan Komunitas Lingkungan dalam Gerakan Lampung Bersih* didasari oleh pandangan bahwa permasalahan lingkungan, khususnya kebersihan dan pengelolaan sampah, tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah sebagai aktor tunggal. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas lingkungan, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan sektor swasta.

Penelitian ini berlandaskan pada teori Kolaborasi Pemerintah yang dikemukakan oleh *Ansell dan Gash (2008)*, di mana kolaborasi didefinisikan sebagai proses bersama antaraktor yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan, mengelola sumber daya bersama, dan menghasilkan kebijakan publik yang lebih inklusif. Dalam konteks “Lampung Bersih”, kolaborasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari *government* (pemerintah sebagai pelaksana tunggal) menuju *governance* (pemerintahan yang berbagi peran dengan masyarakat).

Selanjutnya, teori *Governance Kolaboratif* dari *Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)* menjadi dasar analisis yang menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu *principled engagement* (keterlibatan berdasarkan nilai dan komitmen bersama), *shared motivation* (motivasi dan kepercayaan timbal balik), serta *capacity for joint action* (kapasitas bertindak kolektif). Dalam gerakan “Lampung Bersih”, prinsip ini terlihat dari

komitmen pemerintah daerah dan komunitas untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Teori Partisipasi Masyarakat yang dikemukakan oleh *Cohen dan Uphoff (1980)* juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Partisipasi tidak hanya dipahami sebagai kehadiran masyarakat dalam kegiatan, tetapi juga keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kebijakan lingkungan. Partisipasi masyarakat di Bandar Lampung, misalnya melalui kegiatan *clean-up day* dan *kampanye zero waste*, mencerminkan adanya kepedulian sosial yang tumbuh dari bawah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek perubahan sosial.

Dari sisi pemberdayaan, penelitian ini mengacu pada pandangan *Soetomo (2019)* yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mampu mengelola potensi yang mereka miliki secara mandiri. Kolaborasi yang dibangun dalam gerakan “Lampung Bersih” bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang *empowered*, yakni masyarakat yang sadar lingkungan dan mampu melakukan tindakan nyata tanpa bergantung penuh pada pemerintah.

Kemudian, teori *Modal Sosial (Social Capital)* dari *Putnam (1993)* digunakan untuk menjelaskan peran kepercayaan, norma sosial, dan jejaring dalam memperkuat kolaborasi antaraktor. Dalam konteks gerakan “Lampung Bersih”, modal sosial terbentuk melalui interaksi rutin antara komunitas, masyarakat, dan pemerintah dalam kegiatan gotong royong dan edukasi lingkungan. Modal sosial inilah yang menjadi fondasi bagi munculnya rasa saling percaya dan solidaritas antaraktor.

Untuk melengkapi kerangka analisis, penelitian ini juga mengadopsi Teori Jaringan Kebijakan (*Policy Network Theory*) yang dikemukakan oleh *Agranoff dan McGuire (2001)*. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik modern tidak lagi bersifat hierarkis, tetapi terbentuk melalui jaringan antaraktor yang saling terhubung. Pemerintah berfungsi sebagai *network manager* yang mengkoordinasikan berbagai pihak, sementara komunitas menjadi simpul penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat akar rumput dengan kebijakan pemerintah.

Kerangka pemikiran penelitian ini secara konseptual menggambarkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lingkungan dalam gerakan “Lampung Bersih” terjadi melalui hubungan dinamis antara teori-teori tersebut. Kolaborasi yang efektif menuntut adanya komunikasi yang baik, kepercayaan yang terbangun, dan motivasi bersama untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan penyedia dukungan sumber daya, sedangkan komunitas lingkungan berperan sebagai pelaksana, penggerak, sekaligus pengawas sosial terhadap keberlanjutan program.

Secara operasional, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan memahami makna dan proses kolaborasi antaraktor dalam gerakan “Lampung Bersih”. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, serta interaksi sosial antara pemerintah dan komunitas lingkungan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi program kebersihan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bersama komunitas mitra.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menghubungkan teori dan realitas empiris bahwa efektivitas kolaborasi pemerintah dan komunitas lingkungan dalam gerakan “Lampung Bersih” bergantung pada keseimbangan antara faktor struktural (kebijakan dan sumber daya), faktor sosial (partisipasi, kepercayaan, dan jaringan), serta faktor kultural (nilai-nilai lokal dan semangat gotong royong). Ketiga faktor tersebut saling terkait dalam membentuk sistem tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena fokus utamanya adalah memahami secara mendalam proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas lingkungan dalam mendukung keberhasilan *Gerakan Lampung Bersih* di Kota Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena sosial berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat secara langsung dalam konteks sosialnya. Menurut *Creswell (2018)*, penelitian kualitatif berfungsi untuk mengeksplorasi makna yang muncul dari pengalaman individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan.

Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis atau mencari hubungan kausal antarvariabel, melainkan menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai dinamika interaksi, peran, dan bentuk kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dengan komunitas lingkungan dalam menjalankan program kebersihan dan pengelolaan sampah.

Peneliti berupaya memahami makna dari tindakan, strategi, dan nilai-nilai yang mendasari praktik kolaborasi tersebut, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada konteks, proses, dan interpretasi terhadap makna sosial yang dikonstruksi oleh para aktor (pemerintah dan komunitas).

Menurut *Moleong (2019)*, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik dengan mendeskripsikan perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan manusia dalam konteks tertentu. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

Metode ini relevan karena fenomena kolaborasi pemerintahan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap makna dan

nilai di balik praktik kolaboratif yang selama ini dijalankan di lapangan, termasuk hambatan, peluang, dan faktor pendukung keberhasilannya.

Dengan demikian, penelitian kualitatif deskriptif dipandang sebagai pendekatan yang paling tepat untuk menggali realitas sosial yang terjadi pada *Gerakan Lampung Bersih*, di mana keberhasilan gerakan sangat ditentukan oleh sinergi dan komunikasi antarpihak yang terlibat.

3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, khususnya di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dan beberapa komunitas lingkungan yang menjadi mitra aktif dalam program *Gerakan Lampung Bersih*, seperti Bank Sampah Induk Lampung, Komunitas Zero Waste Lampung, serta sejumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan lainnya.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi yang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Berdasarkan data *DLH Kota Bandar Lampung (2023)*, produksi sampah harian mencapai sekitar 850 ton per hari, dengan tingkat pengangkutan hanya sekitar 60% menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara kapasitas pengelolaan dan volume sampah yang dihasilkan masyarakat.

Kedua, inisiatif *Gerakan Lampung Bersih* merupakan salah satu program strategis daerah yang menggambarkan praktik nyata kolaborasi lintas aktor, di mana pemerintah bekerja sama dengan komunitas lingkungan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama:

1. Bentuk kolaborasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan komunitas lingkungan.
2. Peran masing-masing aktor, baik pemerintah maupun komunitas, dalam pelaksanaan *Gerakan Lampung Bersih*.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut.

Melalui fokus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana model kolaboratif ini bekerja dalam konteks lokal dan bagaimana ia dapat menjadi contoh praktik *good governance* di tingkat daerah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat dalam program *Gerakan Lampung Bersih*, seperti pejabat di Dinas Lingkungan Hidup, pengurus komunitas lingkungan, tokoh masyarakat, serta relawan kebersihan. Informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami dan memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan kolaboratif ini.
2. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah (misalnya laporan tahunan DLH), artikel berita, laporan kegiatan komunitas, serta literatur akademik yang relevan mengenai tata kelola kolaboratif dan partisipasi masyarakat.

Menurut *Sugiyono (2022)*, penggunaan kombinasi data primer dan sekunder bertujuan memperkuat validitas hasil penelitian, karena data yang diperoleh dari lapangan dapat diverifikasi dan dibandingkan dengan dokumen atau catatan tertulis yang tersedia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif karena melalui tahapan ini peneliti berupaya memahami, menafsirkan, dan memaknai data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Menurut *Miles, Huberman, dan Saldaña (2018)*, analisis data kualitatif adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian berakhir. Tujuan utama analisis adalah menemukan pola, hubungan, serta makna mendalam dari data yang diperoleh sehingga mampu menjawab fokus penelitian secara komprehensif.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh *Miles dan Huberman (1994)*, yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Model ini bersifat siklikal, artinya ketiga komponen tersebut tidak berjalan secara linier, melainkan saling berinteraksi dan dilakukan secara berulang sepanjang proses penelitian.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, wawancara, serta dokumen penelitian. Menurut *Sugiyono (2022)*, reduksi data dilakukan agar peneliti dapat memfokuskan perhatian pada data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi berbagai temuan lapangan terkait bentuk kolaborasi pemerintah dan komunitas lingkungan dalam *Gerakan Lampung Bersih*, peran masing-masing aktor, serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam proses kerja sama.

Proses reduksi dilakukan dengan membaca ulang transkrip wawancara secara cermat, memberi kode (coding) pada setiap pernyataan informan yang relevan, serta mengelompokkan data ke dalam kategori tematik seperti *peran pemerintah, inisiatif komunitas, strategi kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan kendala operasional*. Kegiatan reduksi ini penting agar data yang sangat beragam di lapangan dapat diorganisir menjadi informasi yang terarah.

2. Penyajian Data (*Data Display*) Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel tematik, atau matriks hubungan antar-aktor. Menurut *Miles et al. (2018)*, penyajian data yang baik memungkinkan peneliti memahami apa yang sedang terjadi dan menentukan langkah analisis berikutnya.

Dalam konteks penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan cara menyusun uraian tentang pola kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan komunitas lingkungan, menggambarkan bentuk komunikasi dan koordinasi antar-pihak, serta menjelaskan bagaimana kegiatan kebersihan dilaksanakan

secara partisipatif. Narasi deskriptif digunakan untuk menampilkan data empirik dari wawancara dan observasi yang telah dikonfirmasi dengan dokumen resmi.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Kesimpulan awal yang muncul selama analisis akan terus diverifikasi dengan data baru yang masuk dari lapangan untuk memastikan validitas interpretasi. Menurut *Bungin (2020)*, dalam penelitian kualitatif kesimpulan bukanlah hasil akhir yang statis, melainkan interpretasi yang terus berkembang sesuai pemahaman peneliti terhadap konteks data.

Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lingkungan, sejauh mana partisipasi masyarakat berperan dalam keberlanjutan program *Lampung Bersih*, serta bagaimana kepercayaan dan jaringan sosial mendukung kolaborasi tersebut. Proses verifikasi dilakukan dengan triangulasi data dan konfirmasi kepada informan (*member checking*) agar kesimpulan benar-benar mewakili realitas lapangan.

Dengan demikian, teknik analisis interaktif ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kolaborasi pemerintahan dan komunitas secara mendalam, tidak hanya dari apa yang terlihat secara empiris tetapi juga dari makna yang tersembunyi di balik tindakan para aktor sosial.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal proses pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Proses ini bertujuan menemukan pola, makna, dan hubungan antargejala sosial yang muncul di lapangan. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif *Miles dan Huberman (2018)* yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

Pertama, reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi, dan mengorganisasi data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi agar fokus pada aspek-aspek penting seperti bentuk kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan

hambatan kerja sama. Tahap ini membantu peneliti menyederhanakan data mentah agar lebih mudah dianalisis.

Kedua, penyajian data (*data display*) dilakukan dalam bentuk uraian naratif, matriks tematik, dan kutipan hasil wawancara yang relevan. Penyajian ini membantu peneliti memahami hubungan antartema seperti koordinasi antar-aktor, komunikasi pemerintah komunitas, dan dampak kegiatan “Lampung Bersih.”

Ketiga, penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian. Kesimpulan awal yang muncul dari lapangan kemudian diverifikasi melalui teknik triangulasi dan member checking, sehingga hasil analisis benar-benar mewakili pandangan para informan dan kondisi faktual di lapangan.

Model ini bersifat siklikal, artinya ketiga proses tersebut dapat berlangsung berulang hingga data dianggap jenuh. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini menghasilkan pemahaman mendalam mengenai dinamika kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lingkungan dalam mengelola gerakan “Lampung Bersih.”

3.6 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan mencerminkan realitas sosial yang diteliti. Menurut Lincoln dan Guba (1985), validitas dalam penelitian kualitatif tidak diukur dengan angka atau instrumen statistik, melainkan dengan empat kriteria utama, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Untuk meningkatkan kredibilitas, penelitian ini menggunakan beberapa strategi seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check.

- a) *Triangulasi sumber* dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan seperti pejabat DLH, pengurus komunitas lingkungan, dan masyarakat peserta kegiatan.

- b) *Triangulasi teknik* dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari satu cara pengumpulan saja.
- c) *Member check* dilakukan dengan cara mengonfirmasi hasil temuan sementara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan makna yang dimaksud oleh responden.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang serupa. Untuk mencapai hal ini, peneliti memberikan deskripsi kontekstual yang mendalam (*thick description*) mengenai lokasi penelitian, kondisi sosial, serta karakteristik aktor yang terlibat. Menurut Creswell (2018), deskripsi yang rinci memungkinkan pembaca menilai kesesuaian hasil penelitian dengan konteks lain yang memiliki karakteristik sebanding.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas berhubungan dengan konsistensi proses penelitian. Peneliti memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis terdokumentasi secara sistematis melalui *audit trail*. Dengan cara ini, pihak lain dapat melakukan audit terhadap proses penelitian untuk menilai apakah langkah-langkah yang diambil konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar bersumber dari data, bukan dari bias atau asumsi subjektif peneliti. Untuk menjaga hal ini, peneliti mencatat refleksi pribadi dan interpretasi data secara transparan dalam catatan lapangan (*field notes*). Selain itu, penggunaan data dokumenter seperti laporan kegiatan DLH dan komunitas lingkungan juga membantu memperkuat objektivitas hasil penelitian.

Dengan penerapan empat kriteria ini, keabsahan data dalam penelitian dapat terjaga sehingga hasilnya memiliki tingkat kepercayaan dan integritas ilmiah yang tinggi. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip dasar penelitian kualitatif yang

menekankan pada keotentikan makna sosial dan keterlibatan mendalam peneliti terhadap konteks lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, B. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Baiquni, M., & Hidayati, N. (2021). Kolaborasi pemerintah dan komunitas lingkungan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(3), 245–259.
- Bungin, B. (2020). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix. *Public Performance & Management Review*, 38(4), 717–747.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2017). *Collaborative Governance Regimes*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Fischer, F. (2020). Participatory governance: From theory to practice. *Critical Policy Studies*, 14(4), 473–489.
- Hidayati, L. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 112–126.
- Kurniawan, A., & Lestari, D. (2022). Social capital and environmental collaboration: Case of waste bank movement in Indonesia. *International Journal of Environmental Science and Society*, 9(2), 145–160.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mulyana, E., & Santoso, B. (2019). Implementasi kebijakan lingkungan melalui kolaborasi multi-aktor. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(2), 87–103.
- Pratama, A., & Rahmadani, S. (2023). Collaborative governance dalam gerakan kebersihan kota: Studi pada program “Jakarta Bersih.” *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*, 12(1), 55–70.
- Putnam, R. D. (2020). *The Upswing: How America Came Together a Century Ago and How We Can Do It Again*. New York: Simon & Schuster.
- Rizky, D., & Sari, M. (2020). Modal sosial dalam keberhasilan gerakan lingkungan. *Jurnal Sosiologi Lingkungan*, 5(1), 33–46.
- Setiawan, R., & Lubis, R. (2024). Kolaborasi pemerintah dan komunitas dalam pengelolaan kebersihan kota berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Negara*, 9(1), 21–37.
- Soetomo. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Kemandirian dan Partisipasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.